

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :**

**ANANG NURVAOZI**

**B200 140 331**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2014-2016)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**OLEH:**

**ANANG NURVAOZI**

**B200 140 331**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. Suyatmin Waskito Adi, M. Si.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-  
2016)**

Yang ditulis oleh:

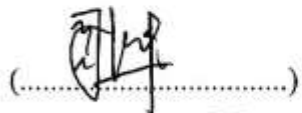
**ANANG NURVAOZI**

**B 200 140 331**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 07 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Suyatmin W.A., M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra Nursiam, Ak, M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs Atwal Arifin, Ak, M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Syamsudin, M.M)**  
NIDN. 0017025701

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Agustus 2018

Penulis



**ANANG NURVAOZI**

**B 200140331**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 105 Kabupaten/Kota. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Analisis menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian diuji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kemandirian keuangan daerah.

**Abstract**

*This research aims to analyse the influence of local genuine revenues (PAD), public allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK) to the level regional financial independence at Government of Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016. Population in this research is all Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016. This research uses purposive sampling method. This research uses a sample of 105 regencies/municipalities. This research data using secondary data obtained from budget realization report at Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016 based on Audit report of local government financial report. Analysis using classical assumption test and then tested hypothesis using multiple linear regression method with coefficient of determination test, F test, and t test. The results showed that the variables of local genuine revenues (PAD) and public allocation fund (DAU) affect the level regional financial independence. Meanwhile, variable of special allocation fund (DAK) has no effect to the level regional financial independence.*

**Keywords:** *Local Genuine Revenues, Public Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure and The Level Regional Financial Independence.*

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan daerah telah melahirkan berbagai kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu kebijakan yang menyertai reformasi keuangan daerah adalah lahirnya otonomi daerah yang ditandai dengan munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dimana Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Erstelita Tria, 2015).

Otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah dan penyerahan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Prinsip dasar dalam pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi (Ernawati, 2017). Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah daripada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pihak eksternal maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri (Ernawati, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri, sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Apabila struktur PAD kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Sementara dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Jika PAD yang diperoleh daerah itu tinggi sedangkan DAU dan DAK yang diterima rendah maka hal tersebut menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri Mauliana (dalam Putri Ikasari, 2015).

Namun, dalam implementasi otonomi daerah terdapat kendala yang dihadapi salah satunya adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antardaerah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal saat ini masih didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan bagi hasil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan kurang lebih 70% masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri).

Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sendiri merupakan dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah. DAU dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi, sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Halim, 2002: 64).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014/2016)”.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah daerah pada Kabupaten/ Kota di provinsi jawa yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2016 yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPR RI) atau yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2014-2016. Data tersebut bersumber dari website resmi BPK RI Pusat di Jakarta yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) atau dapat diperoleh langsung melalui email Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adlah dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisa regresi berganda dengan pengujian hipotesis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	95039,97	1201581,78	235475,3114	166333,65340
DAU	105	358331,87	1332536,85	850283,9517	227504,92484
DAK	105	3750,10	173385,70	67068,9725	30426,77715
KKD	105	8,75	36,35	15,9190	5,42743

Sumber : Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan table 1 di atas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh nilai minimum sebesar 95.039,97, nilai maksimum sebesar 1.201.581,78, nilai rata-rata sebesar 235.475,3114, dan nilai standar deviasi sebesar 166.333,65340 dengan jumlah sampel sebanyak 105.



Variabel dana alokasi umum (DAU) diperoleh nilai minimum sebesar 358.331,87, nilai maksimum sebesar 1.332.536,85, nilai rata-rata sebesar 850.283,9517, dan nilai standar deviasi sebesar 227.504,92484 dengan jumlah sampel sebanyak 105.

Variabel dana alokasi khusus (DAK) diperoleh nilai minimum sebesar 3.750,10, nilai maksimum sebesar 173.385,70, nilai rata-rata sebesar 67.068,9725, dan nilai standar deviasi sebesar 30.426,77715 dengan jumlah sampel sebanyak 105.

Variabel kemandirian keuangan daerah (KKD) diperoleh nilai minimum sebesar 8,75, nilai maksimum sebesar 36,35, nilai rata-rata sebesar 15,9190, dan nilai standar deviasi sebesar 5,42743 dengan jumlah sampel sebanyak 105.

### 3.2 Hasil Analisis Data

#### 3.2.1 Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,527	> 0,05	Distribusi data normal

Sumber : Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel *unstandardized residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Ketentuan	Kesimpulan
2,020	$DU < DW < 4-DU$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 2,020, sedangkan nilai DU dan DL memiliki nilai sebesar 1,7411 dan 1,6237. Nilai tersebut berada pada ketentuan  $DU < DW < 4-DU$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pendapatan asli daerah	0,760	1,315	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana alokasi umum	0,496	2,016	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana alokasi khusus	0,582	1,717	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
Pendapatan asli daerah	0,054	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana alokasi umum	0,064	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana alokasi khusus	0,601	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 3.3 Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	thitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	22,918	25,925	0,000	
Pendapatan asli daerah	2,925	18,560	0,000	H1 diterima
Dana alokasi umum	-1,569	-11,001	0,000	H2 diterima
Dana alokasi khusus	-8,132	-0,826	0,411	H3 ditolak
R <sup>2</sup>	0,821			
Adjusted R <sup>2</sup>	0,816			
Fhitung	154,296			
Sig	0,000			

Sumber :Data sekunder diolah, 2018.

Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 22,918. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja modal dianggap konstan maka besarnya kemandirian keuangan daerah sebesar 22,918.

Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 2,925. Tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap

pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.

Koefisien regresi dana alokasi umum (DAU) sebesar -1,569. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi umum maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap dana alokasi umum maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.

Koefisien regresi dana alokasi khusus (DAK) sebesar -8,132. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi khusus maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap dana alokasi khusus maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.

### 3.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted*  $R^2$  sebesar 0,816 yang berarti sebesar 81,6% variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Sisanya sebesar 18,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### 3.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini digunakan untuk menguji model regresi dengan melihat pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik F berdasarkan pengolahan data pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar  $154,296 >$  nilai Ftabel sebesar 2,69 dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga bisa diartikan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai (fit) dengan datanya.

### 3.3.3 Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 7 untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh thitung sebesar  $18,560 >$  ttabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi

sebesar  $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal tersebut berarti pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik.

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel untuk variabel dana alokasi umum diperoleh thitung sebesar  $-11,001 > \text{ttabel sebesar } -1,660$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hal tersebut berarti dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik.

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 6 untuk variabel dana alokasi khusus diperoleh thitung sebesar  $-0,826 < \text{ttabel sebesar } -1,660$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,411 > \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Hal tersebut berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik.

#### **4. PENUTUP**

Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar  $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$ .

Dana alokasi umum terbukti berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar  $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$ . Dana alokasi khusus terbukti tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar  $0,411 > \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$ .

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat tidak hanya menggunakan data statistik dan informasi tertulis tentang APBD saja, namun bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang kemandirian keuangan daerah dengan menggabungkan laporan rencana dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait dan diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arnawati. (2015). "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah". *ISSN*. 2460-0784.
- Ernawati. (2017). "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah". *ISSN*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 6, No. 2, 2460-0585.
- Ernawati Nyoman, Suzan Leny. (2015). "Pengaruh Pendapatan asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPPKAD Kota Bandung periode 2009-2013)". *ISSN*. 2355-9357.
- Erstelita. (2015). "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikasari, Putri. (2015). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)". *Artikel*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Lestari, dkk. (2016). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara". *ISSN*. Universitas Halu Oleo Kendari. Vol. 1, No. 2, 2502-5171.
- Marizka Reza. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Mudrajad, Kuncoro. (2015). *Otonomi Daerah: menuju era pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nur'ainy, Renny, dkk. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota di Jawa Barat)". *ISSN*. Universitas Gunadarma Jakarta. Vol. 5, 1858-2559.
- Palealu Andreas. (2013). "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *ISSN*. 2303-1174.
- Republik, Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik, Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

- Saputra, Dori. (2014). "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Susanti, dkk. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)". *ISSN*. Universitas Telkom Bandung. Vol. 3, No. 3, 2355-9357.
- Verawaty, dkk. (2017). "Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MbiA*. Universitas Bina Darma. Vol. 16, No. 1, Hal 1-10.